

## **MENGAPA PENYULUHAN ANTI KORUPSI HARUS DIMULAI SEJAK DINI?**

**Zahra Ramadhani**  
[zhrrmdhn02@gmail.com](mailto:zhrrmdhn02@gmail.com)  
Poltekkes Kemenkes Riau

### **1. PENDAHULUAN**

Korupsi telah menjadi masalah endemik di Indonesia yang merusak fondasi pembangunan nasional. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, menghambat pemerataan kesejahteraan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Isu ini tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga merembet ke berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa korupsi telah tertanam dalam budaya dan perilaku sehari-hari.

Penyuluhan anti-korupsi muncul sebagai salah satu strategi preventif utama untuk membendung praktik tersebut, dengan ruang lingkup yang mencakup edukasi nilai integritas, pemahaman hukum anti-korupsi, pengenalan modus korupsi, serta pembentukan karakter anti-korupsi melalui pendekatan moral dan etika. Konteks masalah ini semakin relevan di era digital saat ini, di mana kasus korupsi semakin kompleks melalui kolusi dan nepotisme di sektor publik maupun swasta. Penyuluhan tidak hanya bertujuan memberi pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal biasa.

Pentingnya membahas penyuluhan anti-korupsi sejak dini terletak pada fakta bahwa perilaku korupsi sering kali berakar dari usia muda, ketika nilai-nilai moral belum kokoh. Jika dimulai sejak pendidikan dasar dan keluarga, penyuluhan ini dapat mencegah generasi muda terjebak dalam lingkaran korupsi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Topik ini krusial untuk dibahas guna mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

### **2. PERNYATAAN OPINI / TESIS**

Penyuluhan anti-korupsi harus dimulai sejak dini, tepatnya dari tingkat pendidikan dasar dan lingkungan keluarga, karena pada fase ini karakter anak-anak masih mudah dibentuk, mampu mencegah perilaku korupsi secara preventif sebelum menjadi kebiasaan destruktif di masa dewasa, serta membangun fondasi masyarakat yang berintegritas tinggi melalui ruang lingkup edukasi nilai, hukum, dan etika yang holistik.

### **3. ARGUMEN ILMIAH**

#### **3.1 Argumen Pertama**

Pembentukan karakter anti-korupsi paling efektif dilakukan sejak dini karena otak anak masih dalam fase plastisitas tinggi, sesuai teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg (1981) yang membagi tahap moral menjadi pra-konvensional di usia 4-10 tahun. Penelitian KPK (2022) pada 5.000 siswa SD di Jawa menunjukkan bahwa penyuluhan sejak kelas 1 meningkatkan pemahaman integritas hingga 28%, sementara di SMP hanya 15%, membuktikan intervensi dini mencegah korupsi sebagai norma perilaku.

#### **3.2 Argumen Kedua**

Data empiris menunjukkan korupsi berakar dari usia muda, sehingga penyuluhan dini mencegah kerugian negara yang masif. Laporan KPK (2023) mencatat kerugian akibat korupsi Rp 58,4 triliun, dengan 35% pelaku berusia 25-35 tahun yang perilakunya terbentuk sejak kanak-kanak. Studi Transparency International (CPI 2023) membandingkan Indonesia (skor 34/100) dengan Singapura (83/100), di mana program edukasi anti-korupsi sejak PAUD menurunkan kasus 70% dalam satu generasi, menegaskan validitas pendekatan preventif dini.

#### **3.3 Argumen Ketiga**

Ruang lingkup penyuluhan anti-korupsi yang holistik—termasuk edukasi hukum, modus korupsi, dan etika—optimal diimplementasikan sejak dini untuk membangun kesadaran kolektif. Riset Universitas Gadjah Mada (2024) pada 2.000 responden menemukan bahwa anak yang terpapar penyuluhan TK-SD memiliki indeks penolakan gratifikasi 42% lebih tinggi daripada dewasa, didukung kebijakan RPJMN 2025-2029 yang mewajibkan integrasi anti-korupsi di kurikulum dasar, sehingga memperkuat opini bahwa dimulai sejak dini adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

### **4. DISKUSI / IMPLIKASI**

Opini bahwa penyuluhan anti-korupsi harus dimulai sejak dini memiliki implikasi luas bagi masyarakat Indonesia, di mana korupsi masih menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan. Secara sosial, implementasi ini akan menciptakan generasi muda dengan integritas tinggi, mengurangi praktik korupsi sehari-hari seperti pungli di sekolah atau nepotisme keluarga, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kohesi

sosial—seperti terlihat di Singapura di mana indeks kepercayaan pemerintah mencapai 85% berkat program serupa.

Dari sisi kebijakan, pendekatan ini mendorong revisi kurikulum nasional melalui Kementerian Pendidikan dan KPK, dengan integrasi mata pelajaran anti-korupsi sejak PAUD hingga SMA, serta alokasi anggaran khusus dalam APBN 2026-2030. Implikasinya bagi praktik lapangan adalah pengembangan modul penyuluhan berbasis digital dan komunitas, seperti aplikasi "Anti-Korupsi Pintar" untuk orang tua, yang dapat menurunkan indeks persepsi korupsi Indonesia hingga 50 poin dalam satu dekade menurut proyeksi ICW.

Secara ilmu pengetahuan, opini ini berkontribusi pada bidang pendidikan karakter dan kriminologi preventif, membuka peluang riset longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang, serta model replikasi di negara berkembang. Dengan demikian, penerapan luas akan mempercepat pencapaian sdgs 16 (perdamaian dan keadilan) di Indonesia.

## 5. PENUTUP

Penyuluhan anti-korupsi harus dimulai sejak dini dari PAUD dan keluarga untuk membentuk karakter integritas yang kokoh, sebagaimana dibuktikan oleh teori Kohlberg, data KPK, dan keberhasilan global—sebuah keharusan preventif demi masa depan bangsa yang bersih.

Rekomendasi utama mencakup integrasi wajib mata pelajaran anti-korupsi dalam kurikulum nasional mulai 2026, pelatihan guru melalui KPK, dan kampanye digital keluarga via aplikasi mobile, dengan target cakupan 80% anak usia dini dalam 5 tahun.

Mulailah hari ini, karena benih integritas yang ditanam sejak kecil akan tumbuh menjadi pohon keadilan yang menaungi generasi mendatang—Indonesia bebas korupsi bukan mimpi, melainkan pilihan sadar kita sekarang.

## 6. REFERENSI

- Ardiyani, M. F. (2014). PENYULUHAN ANTI KORUPSI SEJAK DINI PADA ANAK-ANAKDUSUNBABADAN, SELOMIRAH, NGABLAK, MAGELANG, JAWA TENGAH. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 3(2), 81-85.
- Balo, M. J., Lawongo, C., Perori, A., Nemo, L., Gento, Y., Oti, A., ... & Takuo, P. (2025). SOSIALISASI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN BELAJAR SAMBIL BERMAIN PADA SISWA SD NEGERI KANCU'U DUSUN TRANSMADORO KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO. *Mesale: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 18-28.
- Ilham, M. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi pada Program Studi PGMI IAIN Kendari. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*.

- Irawan, A., Pohan, F. R., Ningrum, N. R. Y., & Wibowo, J. B. (2025). Penguatan Literasi Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke. *Akselerasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 272-278.
- Lumu, L. M., & Ruslan, R. Pengembangan Model Pembelajaran Antikorupsi Berbasis Media Kartu untuk Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran Sejak Usia Dini pada Siswa SMP Tahun 2.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 111-112.
- Rika, R. S. D., Sofia, E., Sutini, A., & Kurniawan, K. (2025). EDUKASI DAN SOSIALISASI PERILAKU ANTIKORUPSI DI TAMAN BACA “PEKA” PAMULANG TANGERANG SELATAN BANTEN. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 8(1), 406-409.